

**PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MIGRAN DI KOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

HANDA NOVITASARI
29.1757

*Asdaf Provinsi Papua
Program Studi
Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*

Email:
handanovita42@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *(Contains the background behind the research). Migration is defined as the movement of people from one place to another that transcends political or state boundaries or administrative boundaries or the boundaries of a country's divisions. Population migration is essentially a reflection of differences in economic growth and uneven distribution of development facilities between one region and another. The Population and Civil Registration Office of Jayapura City is a Regional Government Organization (OPD) which has the duties and functions as civil administrators.* **Purpose:** *to find out and identify the role of the Population and Civil Registration Office in controlling the Population Administration, analyze the barriers and describe the efforts of the Population and Civil Registration Office to control the administration of the migrant population in Jayapura City.* **Method:** *This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation* **Result:** *The role of the Jayapura City Population and Civil Registration Service in managing the Immigrant Population Administration as measured by role theory in the opinion of Heroepoetri, Arimbi and Santosa (2003) can be said. communication through socialization that has been carried out has been going well, the role as therapy and the role as dispute resolution is not optimal because there are still immigrants who do not have awareness of the importance of complete population administration documents, making it difficult for people to complete population documents.* **Conclusion:** *has been going quite well according to the applicable Regional Regulations, the role carried out by the Jayapura City Population and Civil Registration Service is good in terms of the dimensions of the role, namely the role as a policy and the role as a strategy, seen from the implementation of ball pick-up and judicial operations, the role as communication through the socialization that has been carried out has been going well, the role as therapy and the role as dispute resolution is not optimal because there are still immigrants who do not have awareness of the importance of complete population administration documents, making it difficult for the community to complete population documents.* **Keywords:** *Role, Orderly Population Administration, Migrants*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain yang melampaui batas politik atau negara ataupun batas administrasi atau batas bagian suatu negara, Migrasi penduduk pada hakekatnya merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan tidak pemerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Yang memiliki tugas dan Fungsi sebagai pelaksana sipil. **Tujuan:** untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menertibkan Administrasi Kependudukan, menganalisis penghambat dan mendeskripsikan Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menertibkan administrasi penduduk migran di Kota Jayapura. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dalam mengelola Administrasi Penduduk Pendetang yang diukur berdasarkan teori peran menurut pendapat Heroepoetri, Arimbi dan Santosa (2003) dapat dikatakan Peran sebagai kebijakan dan peran sebagai strategi sudah baik dilihat dari terlaksananya jemput bola dan operasi yustisi, peran sebagai komunikasi lewat sosialisasi yang dilakukan sudah berjalan baik, Peran sebagai terapi dan peran sebagai penyelesaian sengketa belum optimal karena masih ditemukan penduduk pendatang yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan yang lengkap sehingga membuat masyarakat menjadi susah dalam kelengkapan dokumen kependudukan. **Kesimpulan:** sudah berlangsung dengan cukup baik sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, Peran yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sudah baik dilihat dari dimensi peran yaitu Peran sebagai kebijakan dan peran sebagai strategi sudah baik dilihat dari terlaksananya jemput bola dan operasi yustisi, peran sebagai komunikasi lewat sosialisasi yang dilakukan sudah berjalan baik, Peran sebagai terapi dan peran sebagai penyelesaian sengketa belum optimal karena masih ditemukan penduduk pendatang yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan yang lengkap sehingga membuat masyarakat menjadi kesulitan dalam kelengkapan dokumen kependudukan. **Kata kunci:** Peran, Tertib Administrasi Kependudukan, Migran



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah mengenai kependudukan yang ada di Indonesia meliputi arus pertumbuhan penduduk yang tinggi, penambahan penduduk menyebabkan jumlah penduduk yang besar, dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Proses penyebaran penduduk yang sering terjadi di Indonesia, Provinsi Papua menjadi salah satu tempat tujuan migrasi yang banyak di datangi oleh para migran. Hal ini karena mengarah pada peluang usaha dan upah kerja yang besar serta kesempatan kerja sesuai ekspektasi para penduduk migran. Kota Jayapura menjadi salah satu tempat yang strategis dalam hal migrasi. Dengan potensi yang ada di Kota Jayapura ini seperti tanaman pangan, sumber daya mineral, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perkebunan menjadi salah satu bidang yang sering mendatangkan penduduk migran di karenakan potensi tersebut, sehingga memicu banyak masyarakat yang lebih untuk mencari peluang kerja disana. Migrasi manusia adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau batas politik/negara. Pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Jayapura adalah 414.998. Berikut ini data jumlah penduduk pendatang yang masuk di Kota Jayapura diketahui dari laporan surat pindah masuk yang terdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tahun 2019. Jumlah penduduk pendatang yang masuk ke Kota Jayapura pada tahun 2020 dari luar Papua mencapai 7190 jiwa. Jumlah perpindahan penduduk dari luar yang masuk ke Kota Jayapura berdasarkan tahun 2019-2020 makin meningkat, dimana jumlah tersebut semakin melonjak sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk di Kota Jayapura. Alasan utama migran yang datang atau pindah ke Kota Jayapura karena ajakan keluarga yang kehidupannya sudah mapan sehingga mereka memberikan informasi positif dan mengajak mereka tinggal di Jayapura. Migran meninggalkan daerah asalnya karena faktor pendidikan, ajakan keluarga, dan mencari pengalaman. Jumlah migran yang datang untuk tinggal di Kota Jayapura lebih banyak daripada jumlah data migran yang terdata di Disdukcapil Kota Jayapura. Beberapa diantara migran yang tinggal di Kota Jayapura telah memiliki Surat Pindah Datang yang sebelumnya didapat dari kantor imigrasi tapi belum mendaftarkan diri ke Disdukcapil Kota Jayapura untuk diproses data kependudukannya dan diterbitkan Surat Pindah Datang. Menurut Kasi Pindah Datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, banyak migran yang belum mendaftarkan diri terjadi karena kurang kesadaran akan pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan, jaringan yang kurang stabil dan faktor jarak antara tempat tinggal dengan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura. Dalam mengelola administrasi penduduk migran yang tiap hari semakin meningkat dan tidak terdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk melakukan pengelolaan secara maksimal. Dari uraian masalah di atas penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dengan melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan dengan judul **“PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM TERTIB ADMINISTRASI PENDUDUK MIGRAN DI KOTA JAYAPURA”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain yang melampaui batas politik atau negara ataupun batas administrasi atau batas bagian suatu negara, Migrasi penduduk pada hakekatnya merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan tidak pemerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Yang memiliki tugas dan Fungsi sebagai pelaksana sipil.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Yudha Arisandy (2017), berjudul “Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Probolinggo”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Evaluasi dilaksanakan dengan monev SIAK dengan melibatkan Kelurahan dan Kecamatan, Pelatihan tenaga SIAK dan sosialisasi rutin tentang Administrasi Kependudukan. Evaluasi dilaksanakan pada saat program tersebut berjalan (*On going*). Kedua, Deigy Ireine Tasik dari , berjudul “Efektivitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Tempang Tiga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dalam suatu organisasi keberhasilan pelaksanaan tugas sangat ditentukan oleh orang-orang yang ada didalamnya, dalam hal ini pemerintah kecamatan yang memiliki kualitas sumber daya manusia yaitu kemampuan menanggapi berbagai macam permasalahan yang terjadi. Ketiga, Bayu Angga Saputra (2020) yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam Pengaturan Administrasi Penduduk Pendetang”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gianyar mempunyai kewenangan didalam melakukan tertib administrasi terhadap penduduk pendatang di Kabupaten Gianyar, setiap perpindahan penduduk wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tertib administrasi kependudukan migran di Kota Jayapura; Untuk mengetahui faktor penghambat yang dapat memengaruhi peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengelola Administrasi penduduk migran; Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan Tertib Administrasi Kependudukan bagi migran di Kota Jayapura.

II. METODE

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sebab peneliti fokus dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis, objektif dan benar-benar terjadi, agar dapat dipahami setiap fakta yang terjadi guna mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang terjadi. Menurut sugiyono (2014:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari setingnya, data dapat dikumpulkan pada seting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, disekolah dengan tenaga pendidik dan kependidikan, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain”. Berdasarkan data tersebut, tentunya data yang diperoleh haruslah sesuai dengan fakta sehingga dapat menjadi referensi yang akan menimbulkan beberapa klasifikasi data. Sugiyono (2014:62) mengemukakan bahwa, “setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen”. Prinsip dasar penyajian data adalah

komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Tertib Administrasi Penduduk Migran

A. Peran Sebagai Suatu Kebijakan

Peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bertekad terus memperkuat layanan administrasi kependudukan (Admindex) dengan memberikan pelayanan terbaik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura telah berusaha memberi pelayanan maksimal dengan cara menetapkan waktu dalam penerbitan dokumen kependudukan, kebijakan yang diambil oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura. Kebijakan tersebut diambil dengan tujuan membuat masyarakat nyaman dan tidak harus menunggu lama dalam penertiban dokumen kependudukan terkhususnya bagi penduduk pendatang. Kebijakan tersebut diberi oleh Kepala Dinas adalah selama 1 jam meskipun tertulis 1 jam namun jika dokumen bisa cepat dibuat maka diusahakan lebih cepat dari 1 jam. Menurut Kepala Dinas, Dukcapil Kota Jayapura punya kebijakan yang terus dikerjakan dan diperbaiki terus menerus agar layanan Admindex bisa menjadi lebih mudah, akurat dan lebih cepat selesai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedang berusaha mengelola administrasi kependudukan bagi penduduk pendatang dengan mengacu pada Undang – Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan, namun penduduk pendatang masih ditemukan ada yang belum mengerti akan pengurusan dokumen administrasi untuk penduduk pendatang, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura belum bisa dibilang maksimal dalam mengelola administrasi penduduk pendatang padahal sudah melakukan pelayanan sesuai dengan aturan tersebut. Salah satunya adalah mengurus kepindahan seseorang ke alamat tempat tinggal secara permanen. Bagi penduduk yang hendak pindah tempat tinggal, maka harus mengurus surat keterangan pindah datang. jumlah penduduk pendatang yang masuk ke Kota Jayapura pada tahun 2021 dari luar Papua mencapai 5027 jiwa.

B. Peran Sebagai Strategi

Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*). Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura memiliki strategis dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Strategi 1

Meningkatkan pemahaman masyarakat pendatang mengenai aspek *Legal Identity* dengan fokus kebijakan (1) Penataan regulasi mengenai kependudukan, (2) Pembebasan Biaya Administrasi dalam pengurusan *Legal Identity*, (3) Optimalisasi Peran dan Fungsi RT/RW dalam penyadaran masyarakat pendatang terkait kepemilikan dokumen *Legal Identity*.

2. Strategi 2

Meningkatkan Kualitas Layanan Pendataan Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi dengan fokus kebijakan mengembangkan database kependudukan secara terpadu dan aktif dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Tahun 2018-2022. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Perencanaan strategis di samping mengagendakan

aktivitas pembangunan, harus pula melingkupi program-program yang mendukung dan menjamin layanan masyarakat pendatang dapat dilakukan secara baik dan terarah, yang diantaranya adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas pemerintahan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan penajaman strategi yang dipilih agar terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu selama lima tahun. Sudah menjadi kewajiban rakyat Indonesia yang melakukan perpindahan untuk memiliki surat pengantar pindah dari daerah asal. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 15 tahun 2008 tentang kependudukan dalam pasal 41 Ayat 3 bahwa penduduk yang bukan orang asli Papua yang datang atau pindah ke Wilayah Papua wajib membawa surat keterangan pindah atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari daerah asalnya.

C. Peran Sebagai Alat Komunikasi

Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dalam mensosialisasikan tertib administrasi bagi penduduk migran dengan melakukan kegiatan perencanaan sosialisasi secara terkoordinasi dan sistematis sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan. Kegiatan sosialisasi sudah terjalin komunikasi yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat berupa derajat kontak tatap muka secara langsung berupa dialog (saling bertukar saran/pikiran) yang bentuknya berupa pembinaan dari aparat pemerintah kepada masyarakat pendatang. Terapi yang dimiliki sebagai berikut : Adanya dukungan positif dari kelurahan, kecamatan, perusahaan-perusahaan, maupun masyarakat lokal (RT/RW) dalam pelaksanaan sosialisasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; Adanya kepedulian dan dukungan pemerintah daerah mengenai masuk dan keluarnya penduduk di Kota Jayapura; Adanya kebutuhan dan tuntutan masyarakat pendatang yang semakin meningkat dalam pelayanan pendaftaran penduduk; Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Kepala Dinas beserta jajarannya serta dengan seluruh pegawai. Tidak adanya pemungutan biaya dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. Yang artinya masyarakat penduduk pendatang yang melakukan pengurusan dokumen Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) mulai dari pendaftaran hingga pada penerbitan SKPD semua dilakukan secara gratis tanpa pungutan dalam bentuk apapun begitu juga dalam hal pengurusan administrasi lainnya.

D. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui 8 usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan. Dengan adanya kelengkapan dokumen kependudukan akan mengurangi sengketa yang dihadapi penduduk migran. Permasalahan sengketa di Kota Jayapura sering terjadinya sengketa tanah. Dalam penyelesaiannya, diperlukan berkas aduan yang berisi identitas pengadu dan juga bukti yang berkaitan dengan pengaduan. Jika kedua berkas tersebut tidak ada maka pengaduan tidak akan diproses lebih lanjut lagi. Bukti-bukti yang menguatkan untuk mengajukan gugatan atau permohonan, seperti KTP, KK, Surat Kuasa, Akte dan lain-lain. Maka dari itu pentingnya mengurus administrasi kependudukan bagi masyarakat pendatang di Kota Jayapura.

E. Peran Sebagai Terapi

Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan

bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat. Berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat adalah salah satunya karena tidak memiliki dokumen kependudukan menjadi perhatian serius Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura. Tujuan penyelenggaraan adminduk antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk migran, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Adminduk juga digunakan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Yudha Arisandy (2017), berjudul “Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Probolinggo”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Evaluasi dilaksanakan dengan metode SIAK dengan melibatkan Kelurahan dan Kecamatan, Pelatihan tenaga SIAK dan sosialisasi rutin tentang Administrasi Kependudukan. Evaluasi dilaksanakan pada saat program tersebut berjalan (*On going*). Deigy Ireine Tasik dari , berjudul “Efektivitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Tempang Tiga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa” \Adapun temuan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dalam suatu organisasi keberhasilan pelaksanaan tugas sangat ditentukan oleh orang-orang yang ada didalamnya, dalam hal ini pemerintah kecamatan yang memiliki kualitas sumber daya manusia yaitu kemampuan menanggapi berbagai macam permasalahan yang terjadi. Bayu Angga Saputra (2020) yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam Pengaturan Administrasi Penduduk Pendetang”. Adapun temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gianyar mempunyai kewenangan didalam melakukan tertib administrasi terhadap penduduk pendatang di Kabupaten Gianyar, setiap perpindahan penduduk wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat. Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Tertib Administrasi Penduduk Migran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sudah berlangsung dengan cukup baik sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, Peran yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sudah baik dilihat dari dimensi peran yaitu Peran sebagai kebijakan dan peran sebagai strategi sudah baik dilihat dari terlaksananya jemput bola dan operasi yustisi, peran sebagai komunikasi lewat sosialisasi yang dilakukan sudah berjalan baik, Peran sebagai terapi dan peran sebagai penyelesaian sengketa belum optimal karena masih ditemukan penduduk pendatang yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan yang lengkap sehingga membuat masyarakat menjadi kesulitan dalam kelengkapan dokumen kependudukan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Tertib Administrasi Penduduk Migran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 16 Januari 2022 maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut : Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dalam mengelola Administrasi Penduduk Pendetang yang diukur berdasarkan teori peran

menurut pendapat Heroepoetri, Arimbi dan Santosa (2003) dapat dikatakan Peran sebagai kebijakan dan peran sebagai strategi sudah baik dilihat dari terlaksananya jemput bola dan operasi yustisi, peran sebagai komunikasi lewat sosialisasi yang dilakukan sudah berjalan baik, Peran sebagai terapi dan peran sebagai penyelesaian sengketa belum optimal karena masih ditemukan penduduk pendatang yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan yang lengkap sehingga membuat masyarakat menjadi susah dalam kelengkapan dokumen kependudukan; Faktor yang menghambat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan Tertib Administrasi Penduduk Migran yaitu rendahnya tingkat kesadaran penduduk pendatang akan pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan agar dapat digunakan kedepannya dalam mengurus administrasi dan tidak terhambat dikarenakan kurangnya ataupun tidak lengkap dokumen kependudukan mereka, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dirasa masyarakat terlalu rumit serta kurangnya sumber daya manusia, dan juga masyarakat yang malas mengurus dokumen kependudukan mereka dengan beralasan jarak yang jauh dari tempat tinggal mereka Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura yakni : Dengan mengadakan sosialisasi intensif dan tepat sasaran; Pemasangan iklan pada papan reklame tentang pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk pendatang dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) guna mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Heroepoetri, Arimbi Santosa Dalam Bhattacharjee Anol(2012) saja. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Tertib Administrasi Penduduk Migran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk Menemukan Hasil Yang Lebih Mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura serta jajarannya, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Angga Saputra .(2020).“*Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam Pengaturan Administrasi Penduduk Pendatang*”
- Bhattacharjee, Anol. 2012. *Social Science Research: Principles, Methods and Practice*. Florida: Creative Commons Attribution.
- Deigy Irene Tasik, (2016). “*Efektivitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Tempang Tiga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa.*”
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yudha Arisandy .(2017). “*Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Probolinggo*”.